

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN KETAHANAN  
PANGAN MELALUI PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN DI DESA BALONG  
KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Samsuharjo**

Universitas Gunung Kidul

Email: [samsuharjo2018@gmail.com](mailto:samsuharjo2018@gmail.com)

**Abstract**

*This study aims to describe the implementation of village government policies in increasing food security through the Food Independent Village Program in Balong Village, Girisubo District, Gunungkidul Regency. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The results of this study indicate that government policies to increase food security through the Food Independent Village program in Balong Village include agricultural sector policies that utilize private land and village treasuries to be processed to plant local food. In the industrial sector, people are allowed to establish small industries based on entrepreneurship without having to leave the agricultural sector. The capital sector by establishing microfinance institutions as an effort to meet capital for industry in Balong Village. The role of the village head in improving food security in Balong Village is to provide motivation, good relations with community members, recommend planting local ingredients, brainstorming with community members, and providing encouragement to process root-based food ingredients. The participation of community members in improving food security in Balong Village is by implementing the Village Head's recommendations to plant local food, always following the socialization of the use of yards or vacant land, providing ideas in the socialization of increasing food security.*

**Keyword:** *Village Government Policy; Food Security; Food Independent Village.*

## **Pendahuluan**

Desa Balong terletak dalam wilayah paling selatan Kecamatan Girisubo pada sebelah selatan, barat dan timur dihimpit oleh Kecamatan Girisubo. Desa Balong termasuk dalam daerah terpencil dan hanya memiliki wilayah yang kecil dengan memiliki luas 504,9670 Ha. Sebagian besar penduduk masih mengandalkan sektor pertanian, dibandingkan dengan peminat jenis pekerjaan lainnya. Masyarakat Desa Balong menganggap bahwa petani adalah pekerjaan yang sangat luwes mengingat sebagian besar luas wilayah desa adalah lahan pertanian atau ladang tadah hujan dan kebun. Dibandingkan dengan luas bangunan yang hanya 25,0497 Ha. (Sumber: Data Monografi Desa Balong Tahun 2019).

Indikator komponen ketahanan pangan tersebut akan digunakan untuk mengukur ketahanan pangan di tingkat rumah tangga di masyarakat Desa Balong Girisubo. Keempat indikator ini merupakan indikator utama untuk mendapatkan indeks ketahanan pangan. Ukuran ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dihitung bertahap dengan cara menggabungkan keempat komponen indikator ketahanan pangan tersebut, untuk mendapatkan satu indeks ketahanan pangan.

Ketersediaan pangan dalam rumah tangga yang dipakai dalam pengukuran mengacu pada pangan yang cukup dan tersedia dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Penentuan jangka waktu ketersediaan makanan pokok di perdesaan (seperti daerah penelitian) biasanya dilihat dengan mempertimbangkan jarak antara musim tanam dengan musim tanam berikutnya (Suharjo dkk, 1985:45).

Ukuran ketahanan pangan di masyarakat dapat diketahui melalui partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat masih dapat ditemukan pada masyarakat desa melalui semangat gotong royong masyarakat di dalam pencapaian sembada pangan. Untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan yang bisa dipakai sebagai pedoman kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu perlu menanamkan rasa kesadaran agar segala yang menjadi tujuan bersama dapat terwujud tanpa adanya perbedaan pandangan antar masyarakat. Di sinilah, peran hukum-hukum adat yang terlaksana di suatu masyarakat di uji keberadaannya dalam peningkatan fungsi koordinasi menuju ketahanan pangan. Prioritas yang diupayakan bersama di Desa Balong Girisubo Gunungkidul, adalah meliputi: 1) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yang terdiri dari pertanian, sandang, papan, kesehatan, Pendidikan, keamanan dan ketertiban; 2) Penanggulangan pengangguran meliputi: peningkatan SDM dan pelatihan keterampilan; dan 3) Pengentasan kemiskinan.

Kepala desa harus mengerti benar keadaan dan nilai-nilai sosial budaya masyarakatnya. Hal ini menarik untuk dicermati lebih dalam lagi, sebab keberhasilan kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh situasi disekelilingnya. Pengaruh kepala desa sebagai pemimpin sangat menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan hukum adat yang ada di desa tersebut. Dengan demikian kepala desa harus dapat mempengaruhi rakyatnya melalui proses komunikasi secara timbal balik guna mencapai tujuan ketahanan pangan yang ditetapkan, khususnya dalam program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat perlu ditumbuhkembangkan, peran serta masyarakat dalam peningkatan hasil pangan melalui kebijakan pemerintah desa dapat dimulai dari proses perencanaan ataupun proses pembuatan keputusan. Biasanya masyarakat mengenai apa yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, begitu juga keterlibatan masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan sehingga mendapatkan keuntungan dan manfaat.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diangkat adalah “Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Program Desa Mandiri Pangan di Desa Balong Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul.” Manfaat yang diberikan dari penelitian adalah dapat memberi sumbangan informasi bermanfaat bagi pengembangan ketahanan pangan dan sikap sosial kemasyarakatan di Indonesia serta dapat dijadikan sebagai masukan bagi Desa Balong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan sikap sosial kemasyarakatan.

### **Kebijakan Pemerintah Desa**

Kebijakan pemerintah desa tidak akan lepas dari masalah kebijakan publik. Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya 3 (tiga) komponen dasar yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Dengan demikian, komponen ketiga dari suatu kebijakan yaitu cara, merupakan komponen yang berfungsi untuk mewujudkan dua komponen yang pertama, yaitu tujuan dan sasaran khusus. Cara ini biasanya disebut cara penerapan. Meter dan Horm Wibawa (1994:15) mendefinisikan penerapan kebijakan sebagai tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Kebijakan penerapan ini baru dilaksanakan setelah kebijakan memperoleh pengesahan dari legislatif dan alokasi sumber dayanya juga telah disetujui.

Syafi'ie (1998:56) menyatakan penerapan atau implementasi adalah apa yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan, yang memberikan otorisasi pada suatu program, kebijakan, manfaat, atau suatu bentuk hasil (*output*) yang jelas. Tugas penerapan adalah sebagai penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan pemerintahan menjadi hasil (*outcomes*) dari aktivitas pemerintahan itu sendiri.

Dalam penelitian ini penulis memilih pada bagian merancang struktur proses penerapan dikarenakan penelitian ini memaparkan tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program yang dilaksanakan Desa Balong yang tidak lepas dari partisipasi masyarakat didalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan mengapa penulis mengambil kebijakan pemerintah begitu penting untuk diteliti dikarenakan keberhasilan penerapan Program Desa Balong tidak bisa lepas dari kerjasama berbagai pihak yang menuntut untuk berpartisipasi aktif didalam mensukseskan program ketahanan pangan. Partisipasi kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah mutlak diperlukan. Partisipasi kelompok sasaran merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu program. Tanpa adanya partisipasi dari kelompok sasaran suatu program tidak akan berjalan.

Keith Davis (1967:128) memberikan pengertian partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok-kelompok dalam usaha mencapai tujuan dan turut bertanggungjawab terhadap usaha-usaha yang bersangkutan. Penerimaan kelompok sasaran dalam penelitian ini adalah kelompok sasaran yang dipengaruhi oleh kebijakan. Dalam hal ini adalah tingkat pemahaman atau pengertian kelompok sasaran terhadap penerapan kebijakan pemerintah desa serta pemahaman warga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Peraturan Pemerintah No. 72 /2005 tentang Desa ternyata dinilai lebih longgar dalam melakukan desentralisasi kekuasaan terhadap desa. PP tersebut kembali menghidupkan peran BPD sebagai parlemen desa untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan desa. Meskipun demikian, tentu saja sebagai suatu peraturan pelaksanaan dari UU No. 32/2004, PP itu tidak banyak mampu menawarkan paradigma baru dalam menghidupkan kembali demokrasi di desa. Garis sub ordinasi kewenangan BPD di bawah eksekutif masih dapat dilacak jejaknya dalam PP tentang desa itu, yang pada pasal 29 menyebutkan kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Padahal, pasal 202 ayat (1) UU No. 32/2004 memberikan pengertian pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa (Budi Usman, 2005: 24).

## **Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan yang kokoh merupakan hal yang penting dan perlu diwujudkan karena bagian yang penting dari ketahanan nasional. Ketahanan pangan yang kuat akan memperkuat ketahanan nasional dan sebaliknya. UU No.7 tentang Pangan juga telah mengamanatkan kepada pemerintah bersama masyarakat wajib mengusahakan terwujudnya ketahanan pangan. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi di mana setiap individu pada setiap saat mempunyai akses fisik dan finansial untuk mendapatkan pangan yang cukup, aman, bergizi sesuai kebutuhan diet dan selera untuk dapat hidup sehat dan aktif. Dengan ketahanan pangan, setiap individu dijamin haknya atas pangan yang cukup, aman, bergizi, dan sehat. (Faisal Kasryno, 2004).

Ketahanan pangan atau *food security* merupakan suatu kondisi ketersediaan pangan cukup bagi setiap orang pada setiap saat dan setiap individu mempunyai akses untuk memperolehnya baik secara fisik maupun ekonomi. Dalam pengertian ini ketahanan pangan dikaitkan dengan 3 (tiga) faktor utama yaitu : a) Kecukupan (ketersediaan) pangan, b) Stabilitas ekonomi pangan, dan c) Akses fisik maupun ekonomi bagi individu untuk mendapatkan pangan.

Indonesia menerima konsep ketahanan pangan, yang dilegitimasi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Indonesia memasukkan mutu, keamanan, dan keragaman sebagai kondisi yang harus terpenuhi dalam pemenuhan kebutuhan pangan penduduk secara cukup, merata dan terjangkau. Kondisi Ketahanan Pangan yang diperlukan juga mencakup persyaratan bagi kehidupan sehat. Definisi Ketahanan pangan sebagai termuat dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996 adalah sebagai berikut: “Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau”.

Ketahanan pangan merupakan konsep yang kompleks dan terkait dengan mata rantai sistem pangan dan gizi mulai dari distribusi, produksi, konsumsi dan status gizi. Konsep ketahanan pangan (*food security*) dapat diterapkan untuk menyatakan ketahanan pangan pada beberapa tingkatan: 1). Global; 2). Nasional; 3). Regional; dan 4). Tingkat rumah tangga dan individu. Ketahanan pangan rumah tangga didefinisikan dalam beberapa alternatif rumusan:

- a. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota rumah tangga dalam jumlah, mutu dan beragam sesuai budaya setempat dari waktu ke waktu agar hidup sehat.
- b. Kemampuan rumah tangga untuk mencukupi pangan anggotanya dari produk sendiri dan atau membeli dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat.
- c. Kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar hidup sehat (Usep Sobar Sudrajat, 2004).
- d. Ketahanan pangan minimal harus dua unsur pokok, yaitu ketersediaan dan aksebelitas masyarakat terhadap pangan (Bustanul Arifin, 2004).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menjelaskan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup.

### **Ketahanan Pangan dan Kestabilan dalam Rumah Tangga**

Berdasarkan definisi ketahanan pangan dari FAO (1996) dan UU RI No. 7 tahun 1996, yang mengadopsi definisi dari FAO, ada 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu: (a) Kecukupan ketersediaan pangan; (b) Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (c) Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (d) Kualitas/keamanan pangan. Keempat komponen tersebut akan digunakan untuk mengukur ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dalam studi ini. Keempat indikator ini merupakan indikator utama untuk mendapatkan indeks ketahanan pangan. Ukuran ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dihitung bertahap dengan cara menggabungkan keempat komponen indikator ketahanan pangan tersebut, untuk mendapatkan satu indeks ketahanan pangan.

Di daerah di mana penduduknya mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok digunakan *cutting point* 240 hari sebagai batas untuk menentukan apakah suatu rumah tangga memiliki persediaan makanan pokok cukup/tidak cukup. Penetapan *cutting point* ini didasarkan pada panen padi yang dapat dilakukan selama 3 kali dalam 2 tahun. Pada musim kemarau, dengan

asumsi ada pengairan, penduduk dapat musim tanam padi yang berarti dapat panen 2 kali dalam setahun. Tahun berikutnya, berarti musim tanam rendeng, dimana penduduk hanya panen 1 kali setahun karena pergantian giliran pengairan. Demikian berselang satu tahun penduduk dapat panen padi 2 kali setahun sehingga rata-rata dalam 2 tahun penduduk panen padi sebanyak 3 kali. Disadari bahwa ukuran ketersediaan pangan yang mengacu pada jarak waktu antara satu musim panen dengan musim panen berikutnya hanya berlaku pada rumah tangga dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian pokok. Dengan kata lain, ukuran ketersediaan makanan pokok tersebut memiliki kelemahan jika diterapkan pada rumah tangga yang memiliki sumber penghasilan dari sektor non-pertanian.

### **Desa Mandiri Pangan**

Desa Mandiri Pangan (DMP) adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Program DMP merupakan salah satu program yang difokuskan di daerah rawan pangan dengan mengimplementasikan berbagai model pemberdayaan masyarakat dan gizi dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui pengembangan subsistem: ketersediaan, distribusi dan konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.

Ruang lingkup kegiatan dalam Program DMP meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan pengembangan sarana dan prasarana, yang dimulai dari perencanaan tingkat desa melalui pendekatan partisipatif atau PRA yang dilakukan bersama masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat serta kelembagaan yang ada di desa. Sebagai program pemberdayaan masyarakat, kegiatan utama Program DMP adalah memfasilitasi agar terjadi pembelajaran bagi masyarakat desa sehingga pengetahuan, ketrampilan dan sikap mereka berubah menjadi lebih baik..

### ***Tujuan Desa Mandiri Pangan***

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin perdesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan dikuasainya secara optimal, dalam mencapai kemandirian pangan rumah tangga.
2. Menyamakan persepsi dan tanggung jawab sebagai petugas penyuluh pendamping dengan Tim Pangan Desa dan kelompok-kelompok afinitas.

3. Sebagai tolak ukur dan evaluasi petugas pendamping dalam melaksanakan aksi desa mandiri pangan

### ***Sasaran Desa Mandiri Pangan***

1. Sasaran kegiatan program aksi desa mandiri pangan merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat keluarga kurang mampu, tani, pedagang, peternak, ataupun kegiatan usaha lainnya yang ada didesa rawan pangan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat .
2. Sebagai sarana pendukung kegiatan desa mandiri pangan diantaranya Tim Pangan Desa, Lembaga Keuangan Desa, dan Kelompok afinitas yang dibentuk atas dasar kepentingan dan tujuan yang sama demi kesejahteraan masyarakat

### ***Output:***

- a. Peningkatan usaha produktif berbasis sumber daya lokal yang dimiliki kelompok dan perorangan.
- b. Terbentuknya kawasan mandiri pangan.
- c. Terbentuknya kelembagaan masyarakat.

### ***Outcome:***

- a. Menurunnya jumlah rumah tangga miskin di kawasan rentan pangan.
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah perangkat Desa Balong yang meliputi: kepala Desa Balong, sekretaris desa, urusan umum, urusan perencanaan, urusan keuangan, urusan pemerintahan, urusan kesejahteraan masyarakat, urusan pembangunan, kepala dukuh, dan masyarakat. Seluruh perangkat desa dijadikan subjek penelitian karena jumlahnya kurang dari 100 orang.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yakni dengan mengumpulkan analisis deskriptif non statistik melalui pola berfikir induktif.

## **Pembahasan**

### **Kebijakan Pemerintah Desa Balong dalam Peningkatan Ketahanan Pangan**



Indonesia sudah mempunyai landasan hukum tentang pengaturan pangan yaitu UU No. 7/1996 tentang pangan. UU tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam UU tersebut termuat tentang arti ketahanan pangan, *food security* dan kemandirian pangan, yang secara umum dapat ditafsirkan bahwa pemenuhan pangan masyarakat harus diperhatikan unsur: kecukupan, keamanan, keterjangkauan (kemampuan), kecukupan gizi, aksesibilitas, sumberdaya lokal dan kelanjutan sistem kebijakan pangan.

### **1. Sektor Pertanian**

Petani adalah ujung tombak penjaga ketahanan pangan kita. Bila produktivitas dan pendapatan mereka meningkat, akan sangat signifikan kontribusinya kepada ketahanan pangan desa yang disebabkan adalah:

- a. Jika produktivitas usaha tani meningkat, berarti suplai pangan pemerintah desa meningkat pula. Hal ini berarti meningkatkan tingkat ketersediaan pangan pemerintah desa.
- b. Ketika hasil usaha tani mereka mampu memberikan pendapatan tinggi, berarti akses petani terhadap pangan meningkat.
- c. Naiknya pendapatan mereka berarti aspek keterjangkauan dalam ketahanan pangan desa akan meningkat pula.

(Petikan Wawancara, Kepala Desa 25 Februari, 2019).

Menurut wawancara dengan kepala Desa Balong, strategi dan kebijakan untuk menjaga ketahanan pangan pemerintah desa sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani adalah:

- a. Kebijakan yang berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan dalam hal ini petani sekaligus meningkatkan produksi pangan pemerintah desa. Kebijakan tersebut mencakup para petani yang memiliki luas lahan sehingga memberikan keuntungan untuk dikelola sekaligus meningkatkan produktivitas usaha taninya.
- b. Dalam konteks Pemerintah desa, kebijakan ini dapat direalisasikan dalam wujud mewujudkan ketahanan pangan areal pertanian baru yang luas dengan menggunakan lahan kas desa untuk di sewa beli kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan atau petani berlahan sempit, para peladang berpindah, dan perambah hutan yang diikuti dengan

bimbingan budi daya pertanian secara modern serta mekanisasi pertanian berorientasi komersial (agrobisnis).

- c. Dalam skala makro, pemerintah desa juga mendorong kebijakan harga yang fair. Dalam hal ini sangat penting adanya kebijakan harga dasar yang efektif dan penerapan tarif secara simultan. Tetapi, tidak cukup hanya itu. Hendaknya semua pembeli terlibat dalam aktivitas langsung dan kebijakan di lapangan supaya dibersihkan dari praktek yang tidak fair atau jujur, baik keberadaan maupun perilaku mereka. Sebab, kalau tidak, kenaikan harga pangan tidak akan dinikmati petani, tetapi oleh para tengkulak.
- d. Kebijakan berikutnya adalah peningkatan akses petani terhadap kredit dan perbaikan kualitas pelayanan kredit, menghilangkan lembaga pencari rente dan kelompok *free rider*, serta sebanyak mungkin memberikan dana berputar atau pinjaman lunak untuk perbaikan sarana penyimpanan, transportasi, dan pemasaran hasil pertanian. Sedangkan akses terhadap input produksi penting seperti pupuk dapat diwujudkan dengan tetap menerapkan kebijakan subsidi pupuk.
- e. Kebijakan berikutnya adalah kebijakan yang berorientasi menjaga aspek keterjangkauan pangan yang meliputi pemetaan wilayah-wilayah yang potensial rawan pangan dan perbaikan akses serta ketersediaan logistik ke wilayah-wilayah tersebut. Juga sangat penting untuk menerapkan program perlindungan sosial berkala berupa program OPK (operasi pasar khusus) dan raskin (beras untuk rakyat miskin) sebagai sarana untuk kelompok-kelompok miskin kronis di pedukuhan. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan tentang jumlah dan sebaran kelompok tersebut. Pemetaan ini penting agar program perlindungan sosial ini dapat tepat sasaran.

(Wawancara, Kepala Desa 25 Februari, 2019).

- f. Kebijaksanaan diversifikasi pangan. Kebijakan ini bertujuan membiasakan rakyat mengkonsumsi makanan sehari-hari dari berbagai jenis pangan. Dengan terwujudnya kebiasaan makan yang baru tersebut, ketergantungan terhadap salah satu komoditas pangan dapat direduksi. Di era desentralisasi ini, untuk mengaplikasikan kebijakan ini pemerintah desa perlu berkoordinasi dengan padukuhan agar terwujud kebijakan penganekaragaman pangan pemerintah desa yang berbasis lokal.

Alternatif kebijakan ini, antara lain:

- 1) Pengembangan produksi beragam pangan lokal termasuk dukungan kebijakan harga, riset dan pengembangannya untuk memacu produktivitas komoditas lokal non-beras di daerah.
  - 2) Pemberdayaan masyarakat lokal dengan pembinaan kreatifitas masyarakat dalam memproduksi, memanfaatkan, dan mengkonsumsi berbagai jenis pangan lokal.
  - 3) Pengolahan dan penyediaan berbagai jenis bahan pangan dalam bentuk siap olah untuk masyarakat daerah.
- g. Kebijakan yang berorientasi menjaga stabilitas ketahanan pangan antar waktu (musim). Kebijakan ini meliputi :
- 1) Penjualan hasil pertanian di luar wilayah pemerintah desa yang selektif dengan pangan tertentu hanya diizinkan untuk daerah-daerah yang bukan kategori sentra produksi pangan tersebut dan tidak dilakukan dalam keadaan panen raya.
  - 2) Kebijakan yang bertujuan bagaimana melibatkan masyarakat dalam fungsi mekanisme penyeimbang logistik tradisional yang dikenal dengan nama lumbung desa. Hal ini penting mengingat di era mendatang kemampuan pemerintah desa yang semakin berkurang sebagai penyeimbang antarmusim. Lumbung desa adalah institusi stok pangan lokal yang dulu cukup efektif sebagai penyangga ketahanan pangan masyarakat.

## 2. Sektor Industri

Dengan pesatnya kegiatan ekonomi di desa, terdapat tenaga kerja dari waktu ke waktu bergerak menggunakan waktu senggang pada kegiatan ekonomi yang lebih baru, yaitu di sektor industri kecil atau sering di sebut hime industri. Dengan harapan akan adanya tambahan perubahan nasib, lewat materi yang lebih menjanjikan untuk didapat disamping bertani, karena bertani di desa tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup yang sesuai dengan perkembangan zaman. Realitas seperti ini, jamak terjadi di wilayah desa-desa berkembang manapun, tidak saja di Desa Balong. Adapun kebijakan pangan pemerintah desa pada sektor industri adalah:

- a. Kebijakan mewujudkan ketahanan pangan pedesaan yang mampu menyuburkan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri kecil (*home industry*) (Wawancara, Kepala Desa 25 Februari, 2019)

Daya tarik gemerlap mewujudkan ketahanan pangan, serta ramainya kebijakan mewujudkan ketahanan pangan pedesaan menjadi daya tarik terbesar pergeseran angkatan

kerja. Masalah yang muncul, khususnya di Desa Balong adalah tarikan permintaan sektor industri tidak berbanding dengan tenaga kerja yang memadai. Jika pemanfaatan waktu luang saat tidak ada hujan tampak dari semakin merosotnya peranan sektor pertanian dan meningkatnya peranan sektor industri rumah dan jasa terhadap pendapatan desa.

Strategi mewujudkan ketahanan pangan seperti ini dilakukan sebagai langkah untuk menjadi desa yang maju. Namun, paradigma desa maju yang di anut, yakni bersandar pada sektor industri tanpa mencermati sumber daya manusia yang berkubang pada sektor pertanian, di mana pendidikan rendah serta keterampilan adalah potret nyata di Desa Balong.

- b. Tidak adanya pemungutan biaya pada industri-industri rumah, akan tetapi sebagai imbalan kebijakan hendaknya sumber daya manusia diambil dari Desa Balong sendiri. Seandainya mendatangkan tenaga ahli dari luar Desa Balong harus memberikan kontribusi keahlian jasa pada sektor tenaga kerja.

### **3. Sektor Permodalan (Program Pendampingan Usaha Mandiri)**

Program pendampingan pada masyarakat usaha mandiri Desa Balong adalah Pembentukan lembaga keuangan mikro (LKM) di tingkat Rukun Warga (RW). Kegiatan ini akan akan dijabarkan dalam beberapa sub kegiatan antara lain:

- 1) Fasilitasi pembentukan LKM
- 2) Pembentukan pengurus LKM
- 3) Penyusunan AD/ART
- 4) Pelatihan bagi pengurus LKM
- 5) Penyediaan sarana penunjang
- 6) Pengadaan modal LKM (Wawancara, Kepala Desa 25 Februari, 2019)

Kegiatan ini dipilih atas dasar kenyataan bahwa hingga saat ini masih banyak warga masyarakat kurang modal yang belum mampu memulihkan sumber penghidupan mereka atau sudah mampu memulihkan sumber penghidupan mereka namun usaha tersebut belum mampu berkembang sesuai dengan harapan.

Kendala utama yang dihadapi oleh warga masyarakat yang memiliki industri di daerah perdesaan untuk memulihkan kembali sumber penghidupan yang pernah ditekuni atau mengembangkan usaha yang ditekuni adalah keterbatasan modal usaha. Meskipun di sekitar mereka terdapat lembaga keuangan resmi (bank) yang memberikan fasilitas kredit, namun tidak

semua warga masyarakat mampu untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Hal itu antara lain karena mereka tidak dapat memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu adanya lembaga keuangan mikro (LKM) di desa yang mampu memberikan fasilitas kredit bagi warga masyarakat pedesaan secara cepat dan mudah. Pembentukan LKM di tingkat RW ini diharapkan akan dapat berjalan dengan lancar karena berdasarkan data yang telah dilakukan, sebagian besar RW di Desa Balong bahwa calon penerima program telah memiliki pengalaman dalam melakukan pengelolaan dana bersama. Di setiap RW terdapat paguyuban RW yang memiliki kegiatan arisan dan simpan pinjam.

### **Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan**

Kepala desa memiliki peran yang penting dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan di tingkat desa. Peran Kepala desa dalam memotivasi masyarakat bertujuan agar kebijakan yang sudah dibuat dapat di implementasi dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Motivasi yang dilakukan oleh Kepala desa Balong kepada warga masyarakat sesuai dengan petikan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pemberian motivasi kepada masyarakat bermaksud untuk: memberikan gubahan kepada masyarakat agar selalu berusaha dan membangun, baik di lingkungannya sendiri maupun di lingkungan masyarakat pada umumnya.” (Sumber: Hasil petikan wawancara Kepala Desa, tanggal 25 Februari, 2019).

Motivasi yang diberikan kepala desa bisa berupa sanjungan, perhatian dan hadiah. Motivasi yang diterapkan selalu menghindarkan dari sikap iri dan dengki. Secara bijaksana motivasi yang diberikan berdampak pada peningkatan bukan malah menurunkan. Hal ini dapat diketahui bahwa motivasi yang bersifat maju akan mampu merangsang masyarakat untuk melakukan tindakan dengan baik dan sewajarnya.

Selain dalam memotivasi warga masyarakat, kepala desa juga harus bisa berhubungan baik dengan warga di Desa Balong dalam meningkatkan ketahanan pangan, dan diharapkan dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. Hubungan kepala desa dengan masyarakat sesuai dengan petikan wawancara di bawah ini.

”Hubungan kepala desa dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik dan edukatif. Hubungan yang sifatnya edukatif akan nampak dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam berkomunikasi.” (Sumber: petikan wawancara Kepala Desa, tanggal 25 Februari, 2019).

Hubungan akrab dapat dilihat sejauhmana komunikasi akan terus berlangsung dan sejauhmana hambatan yang sudah dapat diselesaikannya. Bila sudah dapat diidentifikasi segala masalah yang berhubungan dengan komunikasi dan sudah diketahui beberapa hambatan-hambatan yang muncul, segera kepala desa mengadakan koordinasi dengan jajaran aparat desa untuk membahas solusi dan jalan keluar yang harus ditempuhnya. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam memberikan dorongan kepada masyarakat agar mengambil peran dalam kegiatan mewujudkan ketahanan pangan, dapat dilihat pada wawancara dibawah ini.

### **1) Memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi serta mengolah bahan pangan lokal.**

Guna mengetahui tentang peran kepala desa dalam memberikan dorongan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan mengolah bahan pangan lokal umbi-umbian, dapat dilihat pada petikan wawancara di bawah ini.

”Kepala desa akan selalu memberikan dorongan sekuat tenaga, dorongan yang diberikan yaitu anjuran dalam mengkonsumsi dan mengolah bahan pangan lokal berbasis umbi-umbian, karena di Desa Balong khususnya sangat banyak sekali bahan pangan lokal yang tidak dibudidayakan dan dipelihara. Anjuran tersebut dilakukan supaya dapat mewujudkan keberhasilan dalam meningkatkan ketahanan pangan” (Wawancara Kepala Desa, 26 Februari 2019).

Dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa dalam memberikan dorongan kepada masyarakat agar terlibat dalam mewujudkan ketahanan pangan sudah dapat berjalan dengan baik.

### **2) Melakukan curah gagasan dalam meningkatkan ketahanan pangan.**

Kepala desa tidak hanya dituntut harus mempunyai sifat-sifat yang baik, juga harus mampu menginterpretasikan teknik kepemimpinannya supaya proses penggunaan pengaruhnya kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, untuk melihat kepala desa dalam melakukan curah gagasan kepada masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan dapat dilihat pada petikan wawancara di bawah ini.

”Di antara tugas yang harus dilakukan seorang kepala desa adalah memberikan ide-ide yang sifatnya membangun, terutama dalam memberikan ide-ide dalam meningkatkan ketahanan pangan di desa balong supaya dalam meningkatkan ketahanan pangan supaya bisa berjalan dengan baik.” (Sumber: petikan wawancara Kaur Perencanaan, tanggal 26 Februari, 2019).

Kepala desa dituntut untuk mampu mengambil keputusan dalam keadaan mendesak. Kepala desa dalam menentukan keputusan didasarkan pada keadaan masyarakat yang

dipimpinnya, yang ditujukan demi kebaikan masyarakatnya, bukan karena berdasarkan kebutuhan pribadi dari seorang kepala desa.

### **3) Menganjurkan masyarakat untuk menanam umbi-umbian.**

Dalam mengimplementasikan ketahanan pangan di Desa Balong, selain memberikan curah gagasan kepada masyarakat, kepala desa juga menganjurkan warga masyarakat untuk menanam bahan pangan lokal berbasis umbi-umbian, sehingga bisa berhasil secara maksimal. Kemampuan kepala desa dalam menganjurkan masyarakat menanam bahan pangan lokal bisa dilihat dalam petikan wawancara berikut.

”Kepala Desa selalu bisa memberikan anjuran kepada masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumber bahan pangan lokal, anjuran tersebut bermaksud untuk meningkatkan ketahanan pangan di Desa Balong supaya bisa berjalan dengan optimal.”

(Wawancara, Urusan Perencanaan, tanggal 26 Februari, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa dalam memberi anjuran kepada masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumber bahan pangan lokal untuk mewujudkan ketahanan pangan sudah berjalan dengan baik. Evaluasi dan kontrol dilakukan agar dapat diketahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam suatu program. Jika suatu program sudah dapat diketahui hasil evaluasi maka akan diketahui kelebihan dan kekurangan dalam pemanfaatan potensi bahan pangan lokal di desa tersebut.

### **Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Anjuran Kepala Desa**

Masyarakat Desa Balong harus mampu berperan aktif dalam melaksanakan peningkatan ketahanan pangan. Jika peran masyarakat kurang, tentu akan berpengaruh terhadap hasil kebijakan pemerintah Desa Balong dalam meningkatkan ketahanan pangan. Oleh karena itu, sangat penting peran masyarakat dalam ikut serta menanam bahan pangan lokal berbasis umbi-umbian. Beberapa contoh umbi-umbian yang ada di Desa Balong yaitu uwi, kimpul, ubi jalar, bili dan masih banyak lagi. Untuk mengetahui peran warga masyarakat dalam melaksanakan anjuran kepala desa menanam bahan pangan lokal, dapat dilihat dari wawancara di bawah ini.

”Untuk sekarang ini warga masyarakat sudah menanam bahan pangan lokal dilingkungan pekarangan masing-masing,tak lepas dari peran Kepala Desa yang selalu menganjurkan warga masyarakat dalam menanam umbi-umbian yang ada di Desa,memberikan arahan kepada masyarakat agar didalam melaksanakan setiap kegiatan untuk dilakukan bersama atau kerjabakti, agar dalam melaksanakan

kegiatan bisa lebih mudah dan cepat'. (Sumber: petikan wawancara Kaur Perencanaan, tanggal 27 Februari 2019).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui penanaman bahan pangan lokal sudah berjalan dengan baik, terlihat dari partisipasi masyarakat untuk menanam umbi-umbian.

Dalam sosialisasi pemanfaatan pekarangan kosong dan penanaman bahan pangan lokal oleh Pemerintah Desa Balong, ada warga masyarakatnya yang berpartisipasi dan ada juga yang tidak bisa mengikuti. Akan tetapi, menurut kepala Desa Balong, warga masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam sosialisai justru lebih banyak. Untuk mengetahui sikap warga masyarakat Desa Balong dalam menghadiri undangan sosialisasi pemanfaatan pekarangan dan penanaman bahan pangan lokal bisa dilihat dari petikan wawancara kepala Desa di bawah ini.

”Masyarakat menerima dan bisa menghadiri undangan sosialisasi dengan baik. Undangan yang diberikan pada masyarakat memberikan kesan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan orang banyak harus diikuti dengan informasi yang baik dan jelas, agar masyarakat mau menerima serta mendapatkan kejelasan terhadap segala sesuatu yang dikerjakannya”. (Sumber: petikan wawancara Kepala Desa, tanggal 26 Februari 2019).

Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi atau antusias warga masyarakat Desa Balong sangat tinggi dalam menerima serta mengikuti undangan sosialisasi pemanfaatan dan penanaman bahan pangan lokal berbasis umbi-umbian serta dapat menjalankannya dengan baik.

### **Hasil Program Desa Mandiri Pangan bagi Masyarakat (*Output*)**

Bidang pangan terutama bahan pangan lokal mempunyai peran strategis dan potensi yang luar biasa. Indonesia sangat kaya akan ragam pangan lokal yang sudah berakar dan membudi daya di masyarakat. Pangan lokal ialah makanan yang berasal dan dibuat dari produk setempat dan di proses dengan sumber daya dan kearifan lokal. Konsep ketahanan pangan dapat diterapkan untuk menyatakan situasi pangan pada berbagai tingkatan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep ketahanan pangan sangat luas dan beragam. Namun demikian, dari luas beragamnya konsep ketahanan pangan tersebut intinya bertujuan untuk mewujudkan terjaminnya ketersediaan pangan dan meningkatkan produksi bahan pangan lokal bagi warga masyarakat. Di Desa Balong, produksi olahan bahan pangan lokal untuk saat ini semakin meningkat. Meningkatnya produksi bahan pangan tersebut berkat kerjasama antara pemerintah Desa Balong dengan warga



masyarakat. Peningkatan produksi bahan pangan lokal di Desa Balong dapat dilihat dari petikan wawancara di bawah ini.

“Dalam peningkatan produksi bahan pangan lokal yang ada di Desa Balong saat ini terjadi peningkatan, yang dulu hanya satu dua warga yang membuat olahan kripik ubi jalar dan bolu kimpul, tapi saat ini sudah banyak yang mengolah umbi-umbian tersebut untuk dibuat olahan pangan yang menarik, kemudian bisa dijual untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.’ (Sumber: petikan wawancara Kepala Desa Balong, tanggal 26 Februari 2019).

Selain dengan mengolahnya menjadi bahan olahan yang menarik, pada saat panen di musim kemarau, umbi-umbian juga bisa langsung dijual ke pasar ataupun dibeli tengkulak. Hal tersebut disampaikan oleh Ngadiyo, anggota kelompok tani Ngudi Makmur yang ada di Desa Balong dalam petikan wawancara sebagai berikut.

“Kami tidak selalu mengolahnya semua, jika musim kemarau hasil panen lumayan banyak kami bisa langsung menjualnya ke pasar, kadang juga malah dibeli tengkulak untuk dijual kembali.” (Sumber: petikan wawancara, anggota kelompok tani Ngudi Makmur).

Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa produksi bahan pangan lokal berbasis umbi-umbian di Desa Balong mengalami peningkatan yang signifikan, selain dengan mengolah bahan pangan tersebut bisa langsung dijual ke pasaran.

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan di wilayah rentan rawan pangan, Pemerintah Desa Balong mengembangkan kegiatan kawasan mandiri pangan yang dititikberatkan pada tingkat kemiskinan. Dalam pelaksanaan kegiatan kawasan mandiri pangan, terdapat penyuluh pertanian atau petugas lapangan yang diutamakan berpengalaman di bidang penyuluhan pertanian atau bisa disebut pendamping. Strategi yang digunakan untuk mencapai kawasan mandiri pangan dilaksanakan melalui prinsip kemandirian, kecukupan, ekonomi, partisipatif, dan transparan. Fasilitasi pemerintah melalui dana bantuan pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan kegiatan tersebut. Terbentuknya lokasi kawasan mandiri pangan dapat dilihat dalam kutipan wawancara dengan pemerintah Desa Balong di bawah ini.

“Kawasan mandiri pangan merupakan kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari Desa Balong untuk menegakan masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri. Tujuan kegiatan kawasan mandiri pangan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin di wilayah rentan rawan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat berlandaskan kemandirian.” (Wawancara Kepala Desa, tanggal 26 Februari 2019).

Dari kutipan wawancara di atas, terlihat bahwa Desa Balong menjadi kawasan mandiri pangan dengan melibatkan warga masyarakatnya untuk menegakkan masyarakat yang mandiri di wilayah kawasan rentan pangan.

Ruang lingkup kegiatan dalam program desa mandiri pangan meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan pengembangan sarana prasarana, yang dimulai dari perencanaan tingkat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilakukan bersama masyarakat, tokoh masyarakat serta kelembagaan yang ada di desa. Sebagai program pemberdayaan masyarakat, kegiatan utama program desa mandiri pangan adalah memfasilitasi agar terjadi pembelajaran bagi masyarakat desa sehingga pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka berubah menjadi lebih baik. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan masyarakat mempunyai kepastian untuk menangkap peluang di sekitarnya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga mereka. Untuk saat ini, di Desa Balong sudah terbentuk kelompok tani yang mengelola bahan pangan lokal.

“Terbentuknya kelembagaan masyarakat tidak lepas dari kerjasama antara warga masyarakat dengan pemerintah desa balong dengan cara pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan penguatan kelembagaan masyarakat di desa balong.” (Sumber : petikan wawancara, Kepala Desa, tanggal 29 April, 2019).

Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terbentuknya kelembagaan di Desa Balong berkat desa mandiri pangan sangat membantu dalam pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan dengan cara pelatihan dan pendampingan untuk masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas, dapat diringkas bahwa hasil dari program Desa Mandiri Pangan bagi masyarakat Desa Balong meliputi: (a) Meningkatnya usaha produktif berbasis sumber pangan lokal; (b) Terbentuknya lokasi kawasan mandiri pangan; dan (c) Terbentuknya kelembagaan masyarakat.

### **Dampak Program Desa Mandiri Pangan (*Outcome*)**

Dampak desa mandiri pangan sangat berarti di Desa Balong, yang saat ini terbukti sudah dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangi rumah tangga kurang mampu. Warga masyarakat sudah bisa mandiri mengolah bahan pangan lokal untuk dijadikan aneka makanan yang bisa menambah hasil untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Menurunnya

tingkat kemiskinan di Desa Balong dengan program desa mandiri pangan dapat di lihat pada petikan wawancara di bawah ini.

“Saya mengucapkan syukur *alhamdulillah* berkat program Desa Mandiri Pangan yang ada di Desa Balong ini bisa mencapai hasil yang sangat baik dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Semoga ke depannya program ini bisa menjadi lebih baik lagi.” (Sumber: petikan wawancara Kepala Desa, tanggal 26 Februari 2019).

Penurunan jumlah rumah tangga miskin juga dirasakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kasi Kesra) Desa Balong dalam kutipan wawancara sebagai berikut.

“Untuk saat ini, rumah tangga miskin setelah adanya program Desa Mandiri Pangan di Desa Balong mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dapat diketahui dari data yang kami peroleh di tahun 2018.” (Sumber: petikan wawancara, Kasi Kesra Desa Balong, tanggal 27 Februari 2019).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program Desa Mandiri Pangan benar-benar sangat membantu dan bermanfaat bagi warga masyarakat Desa Balong.

Melalui kawasan mandiri pangan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan dan dukungan lintas sektor untuk mendukung usaha produktif bahan pangan lokal yang ada di desa balong gencar dilakukan. Kegiatan tersebut mampu meningkatkan pendapatan dan penyediaan pangan yang mendukung ketahanan pangan. Dapat kita lihat saat ini usaha-usaha olahan bahan pangan lokal yang dilakukan warga masyarakat Desa Balong semakin bertambah. Begitu juga kelompok tani. Terbukti saat ini hampir semua rumah tangga kreatif mengolah bahan pangan lokal umbi-umbian untuk dijadikan olahan pangan yang berbeda untuk dijual kembali.

“Dapat kita lihat saat ini semakin bertambah usaha dan kelompok tani yang dilakukan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Balong. Kami berharap kawasan mandiri pangan ini akan dikembangkan menjadi sentra usaha tani berkelanjutan.” (Sumber: petikan wawancara, Ketua kelompok tani Ngudi Makmur Desa Balong).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dampak desa mandiri pangan juga dapat mengembangkan usaha masyarakat dan kelompok untuk meningkatkan ketahanan pangan.

## **Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini meliputi:

- (a) Kebijakan pemerintah peningkatan ketahanan pangan melalui program Desa Mandiri Pangan di Desa Balong meliputi kebijakan sektor pertanian yang memanfaatkan lahan

pribadi dan kas desa diolah untuk ditanami bahan pangan lokal. Pada sektor industri, masyarakat boleh mendirikan industri-industri kecil berbasis wirausaha tanpa harus meninggalkan sektor pertanian. Pada sektor permodalan, didirikan lembaga keuangan mikro sebagai usaha memenuhi permodalan bagi industri di Desa Balong;

- (b) Peran kepala desa dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Balong yaitu dengan memberikan motivasi, hubungan yang baik dengan warga masyarakat, menganjurkan untuk menanam bahan lokal, melakukan curah gagasan dengan warga masyarakat, serta memberikan dorongan untuk mengolah bahan pangan berbasis umbi-umbian;
- (c) Partisipasi warga masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Balong yaitu dengan melaksanakan anjuran kepala desa untuk menanam bahan pangan lokal, selalu mengikuti sosialisasi pemanfaatan pekarangan atau lahan kosong, memberikan ide gagasan dalam sosialisasi peningkatan ketahanan pangan;
- (d) Hasil program desa mandiri pangan di Desa Balong yaitu meningkatnya usaha produktif berbasis sumber bahan pangan lokal terbentuknya lokasi kawasan mandiri pangan, dan terbentuknya kelembagaan masyarakat;
- (e) Dampak program Desa Mandiri Pangan yaitu menurunnya rumah tangga miskin pada wilayah rentan pangan dan berkembangnya usaha dan kelompok tani.

Terdapat beberapa saran yang diberikan antara lain: (1) Dalam mewujudkan ketahanan pangan, hendaknya kepala desa selalu mengedepankan program-program yang dapat diterapkan terlebih dahulu dengan melihat kemampuan masyarakat. Jika program melibatkan partisipasi masyarakat tentunya kepala desa memiliki pertimbangan adil tentang kesulitan–kesulitan yang dihadapi masyarakat, sehingga program yang terlaksana dapat dipertanggungjawabkan bersama dan merupakan kerja bersama; (2) Keberhasilan kepala desa dalam mewujudkan ketahanan pangan tidak lepas dari hambatan yang dialami yaitu belum terpenuhinya penyediaan air pertanian di saat musim kemarau dan air rumah tangga serta sarana prasarana yang belum memadai, oleh karena itu jika keputusan berdasarkan kebersamaan maka segala hambatan akan diselesaikan secara bersama-sama juga, menghindarkan sikap saling menyalahkan dan menanggung sendiri; dan (3) Masyarakat harus mempunyai motivasi yang baik terhadap pelaksanaan semua program meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan Desa Balong, Girisubo, Gunungkidul, yang dilakukan kepala desa. Hal tersebut

dilakukan agar hasil pangan dapat meningkat sehingga mampu meningkatkan taraf hidup sebagai usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari baik jangka pendek maupun jangka panjang.

## **Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arndt, H.W. 1987. *Pembangunan Ekonomi. Studi Tentang Sejarah Pemikiran*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Bogdan dan Tailor, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: Erlangga.
- Budi, Usman. 2005. *Kewenangan Desa dalam Menentukan Kebijakan*, Jakarta: Erlangga.
- Casley dan Wibawa Kumar, 1994. *Metode Penerapan kebijakan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Deliarnov. 1995. *Perkembangan Pemikiran Bahan Pangan Lokal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Desa Balong, 2017. *Data Monografi Desa*. Gunung Kidul: Pemerintah Desa Balong
- Desa Balong, 2018. *Data Monografi Desa*. Gunung Kidul: Pemerintah Desa Balong.
- Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia. 2005. *Kebijakan Pengembangan Ketahanan Pangan Tahun 2006*. Jakarta: Departemen Perindustrian.
- Djojohadikusumo, S. 1994. *Perkembangan Pemikiran Kebijakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Politik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Kumputindo.
- Kirk dan Miller, 2002. *Definisi Penelitian*. Jakarta: Pustaka Binaan Presindo.
- Mayer, Robert. 1984 *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Meter dan Horm Wibawa, 1994. *Penerapan kebijakan*, Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pareek, Udai. 1983. *Perilaku Organisasi : Pedoman ke Arah Pemahaman Proses Komunikasi Antar Pribadi dan Motivasi Kerja*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

Singarimbun, Masri. 1996. *Metodologi Penelitian Survei Edisi Revisi*. Jakarta.

Suharjo dkk, 1985. *Indeks Ketahanan Pangan*, Jakarta: Balai Pustaka.

Sumodiningrat. 1998. *Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan di Beberapa Desa*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Institut Ilmu Pemerintahan.

Syafi'ie, 1998. *Proses Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta.

Todaro, M.P. 2000. *Peran Kepala Desa*. Jakarta: Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga.